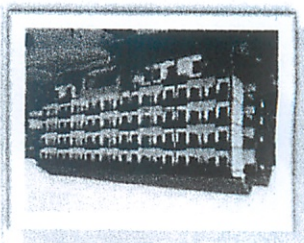
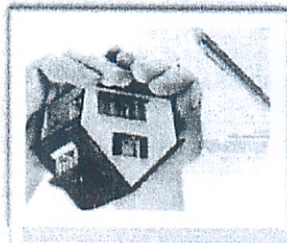


DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
JL. RUHUI RAHAYU I NO.10, BALIKPAPAN - KALIMANTAN TIMUR
TELEPON : (0542) 874091 FAX : (0542) 874085



2017



DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KOTA BALIKPAPAN

LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dengan Rahmat dan hidayah-Nya maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun anggaran 2017 dapat terselesaikan. Dalam proses penyusunan senantiasa berupaya mengacu pada instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka implementasi reformasi birokrasi Pemerintah Kota Balikpapan dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi No. 53 tahun 2014 bahwa nomenklatur LAKIP mengalami perubahan menjadi LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), maka disusunlah LAKIP Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun Anggaran 2017 sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaannya.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2017 diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan *Clean Government* yang melibatkan *Stakeholders*, sehingga ke depan akan tercipta sasaran serta hasil kerja yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan amanat Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Permukiman kota Balikpapan yaitu :

“ TERWUJUDNYA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG LAYAK HUNI”

LAKIP ini secara garis besar berisi Informasi mengenai pelaksanaan rencana kerja beserta pencapaian target dari sasaran strategis Tahun Anggaran 2017. termasuk pengukuran terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran strategis program dan kegiatan Tahun Anggaran 2017 diantaranya adalah :

1. Mengurangi luas kawasan kumuh
2. Mengurangi backlog perumahan
3. Mengurangi persentase rumah tidak layak huni
4. Meningkatkan penyediaan taman kota
5. Meningkatkan pelayanan permakaman

Sangat disadari bahwa penyusunan LAKIP ini masih banyak kelemahan dan kekurangannya. Namun demikian, laporan ini dapat dijadikan tolak ukur terhadap peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan sebagai wujud pertanggung jawaban kepada Walikota Balikpapan dan Masyarakat.

Balikpapan, Februari 2018

KEPALA DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
KOTA BALIKPAPAN



I KETUT ASTANA

Pembina Utama Muda

Nip. 19611202 199203 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2017 ini merupakan laporan evaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan, analisis pencapaian kinerja dan aspek keuangan selama Tahun 2017. Pada Tahun Anggaran 2017 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 35.887.239.395,00 yang kemudian dirasionalisasi menjadi senilai Rp. 29.571.014.395,00 dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 25.947.893.162,00 atau tingkat serapan dana APBD sebesar 87,75%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun anggaran 2017, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Balikpapan berada pada kondisi anggaran dengan SİLPA senilai Rp. 3.623.121.233,00

Berdasarkan uraian pelaksanaan kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, dipaparkan beberapa permasalahan dan kendala yang menunjuk bahwa masih terdapat kegiatan belum diselesaikan. Oleh karena itu perlu dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan konsolidasi dan koordinasi secara internal dalam lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan yang sesuai dengan penjabaran tugas pokok dan fungsi yang lebih operasional

2. Meningkatkan sarana dan prasarana Dinas untuk pelayanan kepada Masyarakat
3. Melaksanakan Sosialisasi yang lebih intensif kepada Masyarakat mengenai program dan kegiatan Disperkim Kota Balikpapan
4. Perlu dilakukan koordinasi dengan pihak yang membuat atau mengeluarkan standar harga agar ada penyesuaian harga yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dikeluarkan pada awal tahun anggaran agar para pelaksana kegiatan tidak terjebak dalam penentuan harga satuan
5. Meningkatkan kualitas SDM baik melalui pendidikan formal maupun informal serta pembinaan yang menyeluruh
6. Meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat dengan sistem yang cepat, tepat dan transparan. Salah satunya upaya yang akan harus dilakukan pada tahun berikutnya diberlakukannya KRK (Keterangan Rencana Kota) melalui website Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan untuk pelayanan kepada Masyarakat sehingga masyarakat diharapkan mendapatkan informasi yang jelas tentang rencana kota dan mendapatkan kepuasan dalam pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Kota Balikpapan

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI	1
B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	1
C. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)	2
D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
E. STRUKTUR ORGANISASI	3
F. SUMBER DAYA MANUSIA	4
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA	5
A. RENCANA STRATEGIS(RENSTRA)	5
1. VISI	5
2. MISI	5
3. TUJUAN	6
4. SASARAN	6
5. INDIKATOR KINERJA	6
6. STRATEGI	7

7. KEBIJAKAN	7
8. PROGRAM/KEGIATAN	8
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	9
C. PERJANJIAN KINERJA	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	11
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	12
C. REALISASI ANGGARAN	14
BAB IV PENUTUP	16

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan kerjanya sebagai wujud pertanggung jawaban atas segala tugas dan kewajibannya.

Perbaikan tata kelola pemerintahan merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem pemerintahan yang berfokus pada peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang diimplementasikan oleh masing – masing instansi pemerintah, hal ini berarti instansi pemerintah merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kerjanya sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi.

Dasar pembentukan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Balikpapan. Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah di bidang penataan kota dan perumahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam konteks penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan yang mengacu pada Visi dan Misi Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021 yaitu :

“MEWUJUDKAN KOTA BALIKPAPAN NYAMAN DIHUNI MENUJU MADINATUL IMAN“

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan dan Permukiman adalah sebagai dokumen arah perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan, strategi, program, sasaran strategis

dan kebijakan keuangan yang ingin dicapai. Dinas Perumahan dan Permukiman memiliki aspek – aspek strategis diantaranya adalah :

1. Meningkatnya kualitas perumahan di kawasan perumahan kumuh
2. Terwujudnya penyediaan hunian vertical (Rusunawa dan Rusunami)
3. Terwujudnya sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat
4. Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH)
5. Tersedianya sarana dan prasarana permakaman

C. PERMASALAHAN UTAMA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal pada Dinas Perumahan dan Permukiman, dapat disimpulkan beberapa permasalahan – permasalahan utama diantaranya :

1. Masih adanya rumah tidak layak huni
2. Tingginya backlog perumahan
3. Masih terdapat 282 ha kawasan kumuh di kota Balikpapan
4. Kurangnya sarana dan prasarana operasional
5. Kurangnya sumber daya manusia (PNS)

D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Menurut Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Balikpapan, tugas pokok dari Dinas Perumahan dan Permukiman Balikpapan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2016, fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penataan kota dan perumahan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Kota;
- b. Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis dibidang perumahan dan permukiman;

- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang perumahan;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pengawasan bangunan;
- e. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- f. Pelaksana unit pelaksanaan teknis dinas;
- g. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan ditunjang dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas;** sebagai pimpinan
- 2. Sekretariat membawahkan :**
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum;
- 3. Bidang Perumahan membawahkan :**
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan;
 - b. Seksi Perencanaan dan Pengembangan PSU; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan;
- **Bidang Permukiman membawahkan :**
 - a. Seksi Permukiman;
 - b. Seksi Pengelolaan Air Limbah dan Air Bersih Permukiman; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Permukiman
- **Bidang Pertamanan dan Permakaman membawahkan :**
 - a. Seksi Pertamanan;
 - b. Seksi Permakaman;
 - c. Seksi Pembibitan dan Penghijauan
- **Unit Pelaksana Teknis Dinas; UPT Rumah Susun Sewa**
- **Kelompok Jabatan Fungsional**

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan data per 31 Desember 2017, Dinas Perumahan dan Permukiman memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 83 (Delapan puluh Tiga) orang. Jika ditabulasi berdasarkan tingkat pendidikan, maka akan didapatkan data berikut :

Tabel 1.1

SDM Dinas Perumahan Dan Permukiman Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	(%)
1.	Pasca Sarjana(S2)	6	7,22
2.	Sarjana(S1)	22	26,51
3.	Sarjana Muda (D3)	4	4,82
4.	SLTA	40	48,19
5.	SLTP	5	6,02
6.	SD	6	7,23
JUMLAH		83	100

Sumber : Sekretariat DTKP Kota Balikpapan, 2016

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel diatas, tingkat pendidikan terbanyak ada pada tingkat pendidikan SLTA yaitu sebanyak 40 orang (48,19%), kemudian disusul dengan lulusan S-1 sebanyak 22 orang (26,51%) dan S-2 sebanyak 6 orang (%). Tingkat pendidikan merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman secara umum.

Jumlah karyawan Dinas Perumahan dan Permukiman dengan tingkat pendidikan S-2 yang cukup besar, dan kondisi Dinas Perumahan sebagai lembaga yang memposisikan dirinya menjadi operasionalisasi perencanaan perumahan dan permukiman Balikpapan tentunya ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan sebagai lembaga menjadi optimal.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan Program Pemerintah Kota Balikpapan dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Dinas Perumahan dan permukiman Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tentu perlu ditunjang oleh Visi dan Misi yang rasional, Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, yaitu :

1. VISI

Visi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah
“TERWUJUDNYA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG LAYAK HUNI”

2. MISI

Misi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan ialah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat dan Berkualitas.
2. Menyediakan Prasarana dan Sarana Perumahan yang Layak dan Merata.
3. Meningkatkan Layanan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Kemudian untuk berhubungan dengan misi Kota Balikpapan yaitu pada point nomor 2 (dua) yaitu menyediakan Prasarana dan Sarana Perumahan yang layak dan merata wujudkan kondisi kota yang layak huni dan berwawasan lingkungan.

Sedangkan untuk misi Kota Balikpapan, yaitu :

1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi
2. Mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan.

3. Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif.
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif
5. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

1. TUJUAN

Sedangkan tujuan Dinas Perumahan dan Permukiman kota Balikpapan adalah :

1. Terwujudnya lingkungan permukiman yang nyaman
2. Tersedianya rumah tinggal yang memenuhi persyaratan
3. Meningkatkan keindahan dan layanan permakaman

2. SASARAN

Kemudian sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan yaitu :

1. Mengurangi luas kawasan kumuh
2. Mengurangi backlog perumahan
3. Mengurangi persentase rumah tidak layak huni
4. Meningkatnya penyediaan taman kota
5. Meningkatnya Pelayanan Permakaman

3. INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah :

1. Penurunan luasan kawasan kumuh
2. Menurunnya backlog perumahan
3. Rumah susun yang terkelola dan terpelihara
4. Rumah tidak layak huni
5. Taman yang terkelola dan terpelihara
6. Areal Permakaman yang terkelola dan terpelihara
7. Perosentase Kualitas Pelayanan administrasi perangkat daerah
8. Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi
9. Prosentase Capaian Kinerja tahunan
10. Peningkatan disiplin pegawai
11. Terpeliharanya dan dokumentasi kegiatan bidang perumahan dan permukiman
12. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

4. STRATEGI

Strategi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan yaitu :

1. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh
2. Mendorong Pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah
3. Fasilitasi Pembiayaan untuk perbaikan rumah tidak layak huni
4. Pembangunan Taman kota baru
5. Perbaikan Layanan Permakaman

5. KEBIJAKAN

Kebijaksanaan dan program pemerintah Kota Balikpapan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun 2011-2016.

Seperti diketahui bersama bahwa visi Kota Balikpapan yaitu :

TERWUJUDNYA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA INDUSTRI, PERDAGANGAN, JASA DAN PARIWISATA YANG DIDUKUNG OLEH PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN MASYARAKAT YANG BERIMAN, SEJAHTERA, RELEGIUS DAN BERPERADAPAN MAJU (MADINATUL IMAN)

Sedangkan pernyataan visi Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2016-2021, sebagai berikut :

“ MEWUJUDKAN KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA LAYAK HUNI MENUJU MADINATUL IMAN “

Sedangkan untuk meningkatkan kinerja aparatur dan optimalisasi pelayanan pada masyarakat sasaran nya :

- 1) . Implementasi SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan pemberian layanan prima bidang pemanfaatan dan pengendalian ruang serta bangunan
- 2) . Kedisiplinan pegawai

6. PROGRAM/KEGIATAN

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (Out come) dan keluaran (Out put) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Dalam rangka sinkronisasi antara formulasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan yang dimiliki Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dengan RPJM Daerah Kota Balikpapan didukung sumber pendanaan APBD Kota Balikpapan, maka program dan kegiatan yang akan dijalankan selama periode 2016 - 2021 dengan satu tahun masa transisi (2016) adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan didukung oleh kegiatan-kegiatan Pemeliharaan Infrastruktur Rumah Susun, Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni.
2. Program Lingkungan Sehat Perumahan didukung dengan Kegiatan-kegiatan Pembangunan IPAL Komunal Perpipaan, Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh, Pembangunan Sambungan Rumah Sanitasi, Pembangunan Sarana Air Limbah Individu, Operasional POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Bidang Permukiman.
3. Program Pengelolaan Areal Permakaman di dukung dengan Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permakaman, Penataan Makam Terpadu Km 15, Pembayaran Ganti Rugi Lahan Permakaman.
4. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di dukung dengan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Hias/Peneduh, Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota.
5. Program memfasilitasi pembangunan sanitasi sehat
6. Program peningkatan kinerja pengawasan secara administrasi dan operasional
7. Program mewujudkan pengawasan berpola pemberdayaan masyarakat.

G. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya kualitas perumahan di kawasan perumahan kumuh	1.1	Jumlah rumah tidak layak huni	Rumah tidak layak huni berkurang 0,01%
	1.2	Jumlah pembangunan rumah sederhana untuk PNS Kota Balikpapan	200 unit
2. Terwujudnya penyediaan hunian vertical (Rusunawa dan Rusunami)	2.1	Jumlah Rusunawa	Terbangunnya rusunawa 1 unit
3. Terwujudnya sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat	3.1	Prosentase rumah tinggal bersanitasi	Rumah tinggal bersanitasi meningkat 1%
4. Tersedianya Ruang Terbuka Hijau	4.1	Jumlah Taman	0,011 ha
	4.2.	Jumlah bibit untuk tanaman hias dan peneduh	900.000 bibit tanaman hias dan 90.000 bibit tanaman peneduh
5. Tersedianya sarana dan prasarana permakaman	5.1	Jumlah lokasi makam	32 areal permakaman

H. PERJANJIAN KINERJA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1. Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	hektar	Kawasan Kumuh berkurang 5 ha
2. Mengurangi backlog perumahan	Persentase penurunan backlog perumahan	unit	Backlog perumahan berkurang 2621 unit
3. Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni diakses seluruh lapisan masyarakat	Persentase penurunan rumah tidak layak huni	hektar	Peningkatan rumah tidak layak huni menjadi layak huni 40 unit
4. Meningkatnya Penyediaan taman kota	Persentase penyediaan taman kota	hektar	Peningkatan luas taman kota yang terpelihara dan terkelola 1 ha
5. Meningkatnya pelayanan pemakaman	Prosentase ahli waris yang merasa puas terhadap pelayanan	%	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Menjawab hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Balikpapan :

Dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan tahun anggaran 2016 oleh Inspektorat Kota Balikpapan dengan hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja (LKj) sebesar 55 atau Kategori : CC (Cukup/memadai perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar) telah ditindak lanjuti yaitu :

- a. Sudah dilakukan pengumpulan data dan monitoring
- b. Telah dilakukan data yang ditampilkan adalah prosentase pencapaian target, secara objektif agar capaian kinerja memang lebih baik
- c. Sudah menampilkan anggaran kinerja permasing-masing indikator kinerja utama
- d. Sudah ada SOP telah dipasang ditempat yang mudah terlihat

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Mengurangi luas kawasan kumuh	1. Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	%	Kawasan kumuh berkurang 5 ha	0,01%	100%
2.	Mengurangi Backlog Perumahan	Persentase penurunan backlog perumahan	unit	Backlog perumahan berkurang		100%
3.	Terwujudnya sanitasi sehat yang	1. prosentase rumah tinggal	unit	Rumah bersanitasi	1 %	100%

	dapat diakses seluruh lapisan masyarakat	bersanitasi		meningkat 1%		
4.	Meningkatnya penyediaan taman kota	1. Prosentase penyediaan taman kota	hektar	Terbangunnya taman kota	1 ha	100%
5.	Meningkatnya pelayanan permakaman	1. Prosentase ahli waris yang merasa puas terhadap pelayanan	%	Terbangunnya areal permakaman	32 areal	100%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Realisasi	Pencapaian Target (%)
			Uraian	Satuan	Target		
1.	Prosentase berkurangnya luas kawasan kumuh	%	1. Jumlah rumah tidak layak huni	Unit	Rumah tidak layak huni berkurang 52,38%	52,38%	100%

Keterangan : 1. lokasi seluruh Kecamatan di Balikpapan pembangunan rumah layak huni yang terealisasi hanya 55 unit sehingga mengurangi 52,38% dari 105 unit.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Realisasi	Pencapaian Target (%)
		Uraian	Satuan	Target		
3.	Terwujudnya sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat	1. Prosentase rumah tinggal bersanitasi	%	Rumah bersanitasi meningkat 1%	1%	100%
		2. Prosentase kawasan kumuh terhadap kawasan permukiman	%	Kawasan kumuh berkurang 0,01%	0,01%	100%

Keterangan : 1. berlokasi di kelurahan Sepinggan, Kariangau dan Muara Rapak



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Jl. Ruhui Rahayu I No. 10 Telp. (0542) 874091 Fax. (0542) 874085
Balikpapan

B. Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan

Capaian Akuntabilitas Keuangan Persasaran :

No.	Program	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 2.362.041.960,--	Rp. 1.695.299.846,-	71,77%
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp. 2.562.050.000,-	Rp. 2.236.423.069,-	87,29%
3.	Program Lingkungan sehat perumahan	Rp. 4.578.916.435,-	Rp. 4.023.617.085,-	87,87%
4.	Program Pengembangan perumahan	Rp. 2.864.436.000,-	Rp. 1.596.815.385,-	55,75%
5.	Program pengelolaan areal permakaman	Rp. 5.026.875.000,-	Rp. 4.898.644.477,-	97,45%
6.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp. 12.151.695.000,-	Rp. 11.497.093.300,-	94,61%
TOTAL		Rp.29.546.014.395,-	Rp. 25.947.893.162,-	87,75%

(Dua puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh dua rupiah)

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa target anggaran yang masih belum maksimal terealisasi anggarannya yaitu program pengembangan perumahan yang persentase sebesar 55,75%. Berikut Pejelasan permasalahan yang timbul dan menyebabkan kurangnya realisasi anggaran tersebut :

1. Pengembangan Perumahan

- Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni target pembangunan 105 unit yang terealisasi Cuma 55 unit karena lokasi calon penerima tidak sesuai RTRW

❖ **Belanja Tidak Langsung**

Alokasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) dalam Tahun Anggaran 2017 ini sebesar Rp. 4.409.761.000,00,- sampai dengan akhir Tahun Anggaran dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.163.555.889,00 atau 88,61%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.246.205.111,00,-.Tabel Realisasi Belanja Tidak Langsung

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA DANA
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1.	Belanja Pegawai dan Tunjangan Lainnya.	4.409.761.000,-	4.163.555.889,-	88,61	246.205.111,-

❖ **Belanja Langsung**

Alokasi Anggaran Belanja Langsung (BL) dalam Tahun Anggaran 2016 ini sebesar Rp. 29.571.014.395,-,- sampai dengan akhir Tahun Anggaran dapat direalisasikan sebesar Rp. 25.947.893.162,- atau 87,75%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.3.623.121.233,-.

Tabel Realisasi Belanja Langsung

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA DANA
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
2.	Belanja Langsung	29.571.014.395,-	25.947.893.162,-	87,75	3.623.121.233,-

**BAB IV
PENUTUP**

KESIMPULAN

Tugas pokok dan fungsi, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan didalam pelaksanaan urusan wajib bidang perumahan,permukiman serta Pertamanan dan permukiman, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan merupakan dokumen yang sangat penting untuk Perumahan dan pedoman di dalam penyelenggaraan dan pengendalian perumahan,permukiman serta pertamanan dan permukiman.

Adapun kesimpulannya adalah :

1. Meningkatkan kualitas perumahan di kawasan permukiman kumuh, sehingga permukiman masyarakat menjadi lebih baik,lebih sehat (hygienis) guna menciptakan masyarakat yang lebih baik,sehat dan sejahtera.

2. Terwujudnya penyediaan hunian vertical (Rusunawa), guna mewujudkan Tata Ruang kota lebih tertata sehingga pembangunan perkotaan bisa lebih indah dan rapi.

3. Terwujudnya sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat, sehingga lingkungan masyarakat menjadi lebih bersih dengan harapan permukiman masyarakat menjadi lebih baik dan sehat.

4. Terciptanya Ruang Terbuka Hijau yang teduh dan sejuk serta di dukung dengan areal permukiman yang tertata dengan baik sehingga menciptakan kehidupan masyarakat yang tenang, nyaman dan damai.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk dari transparansi terhadap masyarakat. Terima Kasih.

Balikkpapan, Februari 2018

**KEPALA DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
KOTA BALIKPAPAN**

LKETUT ASTANA

Pemina Utama Muda
Nip. 19611202 199203 1 005